

**DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP DALAM
RANGKA PENCIPTAAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
(STUDI KASUS BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DARI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KEPADA LEMBAGA PELATIHAN
KERJA SWASTA)**

*THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF TRAINING LIFE PROFICIENCY IN
CREATION AND GROWTH OF NEW ENTREPRENEURS
(CASE STUDY OF WORK TRAINING PROGRAM ASSISTANCE FROM THE
MINISTRY OF MANPOWER TO PRIVATE VOCATIONAL TRAINING INSTITUTIONS)*

Yeni Nuraeni

Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Ketenagakerjaan RI

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

yeninur@hotmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki tingkat kewirausahaan yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asean seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Rendahnya tingkat kewirausahaan di Indonesia berbanding lurus dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini bisa dipahami karena dengan rendahnya tingkat kewirausahaan akan berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia untuk dapat menampung angkatan kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat angkatan kerja untuk berwirausaha, maka pemerintah perlu menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dalam mencari peluang penciptakan dan mengembangkan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap dampak dari pemberian bantuan program pelatihan kecakapan hidup yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder maupun data primer yang dikumpulkan melalui metode penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penyelenggaraan program pelatihan kecakapan hidup yang dilaksanakan di tujuh Provinsi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil evaluasi terhadap LPKS, Peserta Pelatihan dan Instruktur Pelatihan menunjukkan nilai yang sangat baik. Penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan peluang pada masyarakat untuk mengembangkan usaha khususnya bagi angkatan kerja muda yang putus sekolah. Melalui bimbingan dari pemilik LPKS yang sebagian besar sudah memiliki jaringan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta telah memiliki bisnis di bidang yang sesuai dengan pelatihan kecakapan hidup yang diselenggarakan, alumni pelatihan mendapatkan motivasi dan keberanian menanggung risiko merintis dan mengembangkan usaha mandiri.

Kata Kunci: Pelatihan Kecakapan Hidup; Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Pengembangan Kewirausahaan

ABSTRACT

Indonesia has a low level of entrepreneurship when compared to neighboring countries in Asean such as Singapore, Malaysia and Thailand. The low level of entrepreneurship in Indonesia is directly proportional to the high level of open unemployment. This is understandable because the low level of entrepreneurship will have an impact on the limited job opportunities available to accommodate the workforce. One of the efforts to increase the interest of the workforce for entrepreneurship, the government needs to organize various educational and training programs to increase the competence of the workforce in looking for opportunities to create and develop businesses. This study aims to evaluate the impact of the provision of life skills training assistance provided by the Ministry of Manpower to Private Job Training Institutions. The data used in this research are secondary data and primary data collected through questionnaires and in-depth interviews. The sample used in this study includes the implementation of life skills training programs in seven provinces. Data

analysis was carried out descriptively. The results of the evaluation of LPKS, Training Participants and Training Instructors showed very good scores. The provision of life skills training has a significant impact in providing opportunities for the community to develop businesses, especially for the young workforce who have dropped out of school. Through guidance from LPKS owners, most of whom already have networks with the Business World and the Industrial World and already have businesses in fields that are in accordance with the Life Skills training being held, training alumni gain motivation and courage to take the risk of starting and developing independent businesses.

Keywords: Life Skills Training; Private Job Training Institutions; Entrepreneurship Development

PENDAHULUAN

Jumlah angkatan kerja di suatu negara dapat menjadi modal dan memberikan kontribusi yang besar dalam memproduksi barang dan jasa bagi negara tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila negara yang memiliki angkatan kerja yang berlimpah tidak disertai upaya untuk menyediakan lapangan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan kerja dan akan menyebabkan tingginya angka pengangguran di negara tersebut. Sebagian besar negara di dunia menghadapi masalah pengangguran dan setiap negara selalu berusaha mengupayakan untuk menekan angka pengangguran untuk menghindari berbagai permasalahan yang dapat terjadi jika angka pengangguran semakin tinggi.

Bagaimana dengan kondisi angkatan kerja di Indonesia? Apakah dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menghasilkan barang dan jasa atau malah lebih banyak menyumbang permasalahan pengangguran? Jika melihat data angkatan kerja yang

dipublikasikan oleh Balai Pusat Statistik, tercatat pada tahun 2017 ada sekitar 7 juta lebih orang yang menganggur, dari total keseluruhan 128 juta angkatan kerja. Secara lebih spesifik, per golongan umur, angkatan kerja terbesar di Indonesia adalah mereka yang berusia 35-39 tahun (BPS, 2018). Angkatan kerja dari golongan usia ini mencapai 17,6 juta orang. Posisi kedua terbesar diduduki oleh mereka yang berusia 30-34 tahun, dengan jumlah 15,5 juta orang (BPS, 2018). Dengan demikian, situasi angkatan kerja di Indonesia bila merujuk pada golongan umur, adalah kelompok usia produktif, yang sekaligus berada pada jenjang kelompok pekerja utama. Artinya, angkatan kerja ini sangatlah potensial menjadi mesin penggerak produksi barang dan jasa (Kurniawan, 2018).

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja Indonesia meningkat menjadi 136,18 juta orang. Angka ini terdiri dari 55,28 juta bekerja di sektor formal, dan 74,08 juta bekerja di sektor informal dan 6,82 juta orang dari angkatan kerja Indonesia masih menganggur seperti terlihat pada gambar 1 (Asyari, 2019)



Gambar 1: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2018

Sumber : (Asyari, 2019)

Sebagian besar perusahaan di Indonesia bertahan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 93 persennya adalah perusahaan yang bersifat informal. Sementara, perusahaan informal umumnya adalah berskala mikro, dengan sedikit karyawan, tingkat pendidikan yang rendah dan berjejaring dalam mata rantai pasokan secara lokal (Kurniawan, 2018). Berdasarkan data BPS Februari tahun 2019, lapangan kerja di Indonesia sebanyak 57,27 persen disumbang oleh sektor informal

seperti terlihat pada gambar 2 (Rahadian, 2019). Proporsi tinggi ini mengkhawatirkan mengingat sektor tersebut tidak memiliki proteksi dari Undang-Undang terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian informal (Arzyan, 2020). Kenaikan upah minimum memang berdampak positif bagi pekerja di sektor formal, tetapi tidak dampak pada pekerja di sektor informal (Hohberg & Lay, 2015).



Gambar 2 : Struktur Pasar Tenaga Kerja Indonesia
 Sumber : (Rahadian, 2019)

Terjadinya gap antara jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja di suatu negara menimbulkan pengangguran yang menunjukkan angkatan kerja tidak dapat terserap secara maksimal di pasar tenaga kerja. Pengangguran di Indonesia menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran 5,13% dan tahun 2019 tingkat pengangguran turun di angka 5,01% seperti terlihat pada gambar 3. Pemerintah Indonesia menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus turun hingga 4,0%- 4,6% di tahun 2024. Pada periode 2019-2024 ini, Presiden Indonesia Joko Widodo merencanakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan mendukung perbaikan pelatihan vokasional di Indonesia Sumber (Asyari, 2019).



Gambar 3: Tren Tingkat Pengangguran Di Indonesia
 Sumber (Asyari, 2019)

Meskipun tingkat pengangguran di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menurun, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga ternyata angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi seperti terlihat pada gambar 4. Masih tingginya tingkat pengangguran Di Indonesia menunjukkan struktur perekonomian Indonesia tidak proposional. Sektor non-tradable dari tahun ke tahun makin menguasai perekonomian Indonesia, di mana sektor ini umumnya terdiri dari sektor-sektor jasa yang

memerlukan tenaga kerja yang relatif sedikit serta membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi (Rahadian, 2019). Sedangkan sektor *tradable* yang memiliki karakteristik dapat

menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang rendah semakin terpinggirkan (Rahadian, 2019).



Gambar 4 : Perbandingan Tingkat Pengangguran di Indonesia dan Negara-Negara Asean
Sumber : (Rahadian, 2019)

Tingkat pengangguran terbuka jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, terlihat yang paling tinggi adalah lulusan SMK. Tingkat pengangguran tertinggi itu terjadi pada kelompok pemuda berusia 15 hingga 24 tahun sebesar 16,28 persen, kemudian golongan usia 25 hingga 59 tahun sebesar 3,14 persen serta usia 60 tahun keatas jadi yang terendah hanya 1,08 persen. Tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun disebabkan mereka baru lulus SMA, lulus universitas serta ada yang masih mencari pekerjaan, sehingga pengangguran tertinggi itu terjadi pada kelompok usia muda. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tinggi, namun persentasenya terus menurun hingga mencapai 8,49 persen pada Februari 2020 seperti terlihat pada gambar 5 dibandingkan pada february tahun 2018 yang masih sebesar 8,92 (Yovanda, 2020).

Kurangnya pendidikan yang memenuhi kualifikasi serta tidak terpenuhinya standar keterampilan hidup menjadikan penyerapan tenaga kerja di Indonesia lebih sulit karena saat ini semua perusahaan serta lembaga memiliki standar kualifikasi pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah masih tingginya tingkat pengangguran adalah dengan menyelenggarakan berbagai macam program untuk menciptakan para wirausaha baru. Upaya Penciptaan wirausaha baru tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak diantaranya dunia pendidikan, dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wirausahawan baru ternyata tidak banyak dilahirkan dari masyarakat yang memiliki pendidikan formal, tetapi banyak dihasilkan dari kalangan masyarakat yang mengalami krisis ekonomi sehingga mereka harus berpikir untuk memiliki usaha sebagai sumber penghasilan baru (Deni, 2018).

Salah satu strategi untuk dapat menghasilkan para wirausahawan baru adalah melalui penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang merupakan salah satu jenis pendidikan non formal. Tujuan utama dari pendidikan kecakapan hidup adalah memberi bekal kepada masyarakat untuk dapat hidup secara mandiri. Kecakapan hidup ini diartikan sebagai kecakapan seseorang yang mau dan berani menghadapi permasalahan hidup secara wajar tanpa merasa tertekan serta secara proaktif dan



Gambar 5 : Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber : (Yovanda, 2020)

kreatif mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan hidup (Deni, 2018). Kecakapan hidup ini digunakan sebagai salah satu fokus analisis dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja (Anwar, 2006).

Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya di masa mendatang. WHO (1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.

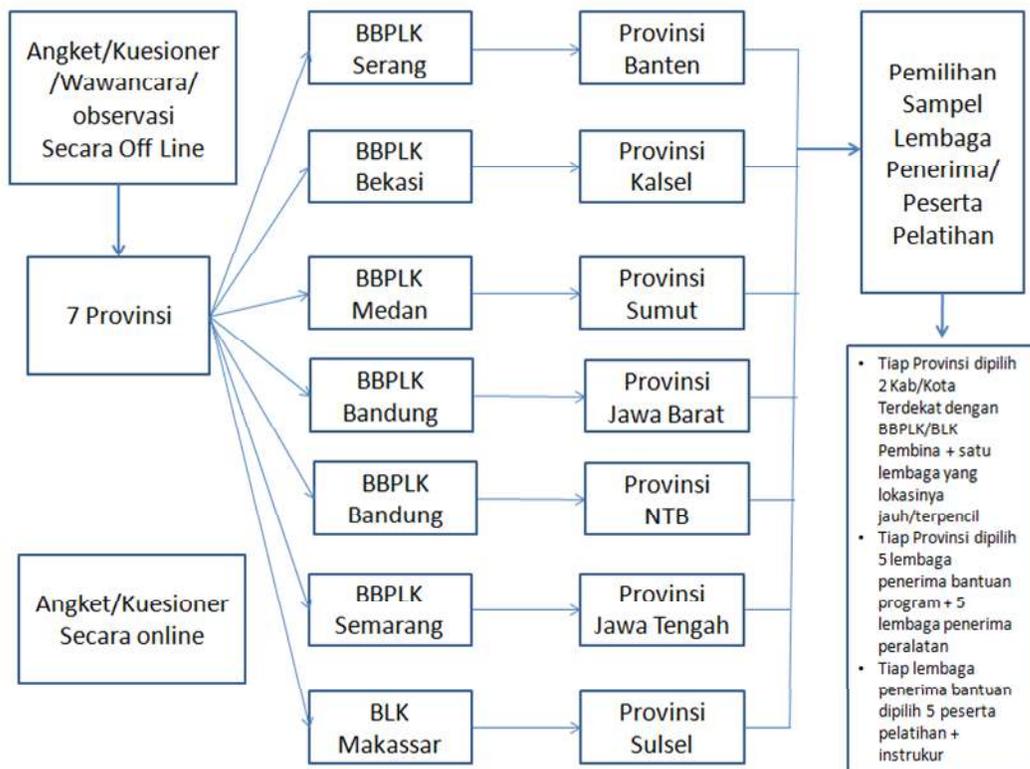
Berdasarkan kondisi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bantuan

program pelatihan kecakapan hidup dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) terhadap penumbuhan wirausaha baru khususnya dikalangan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik mengambil sampel dari *purposive sampling* disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Lokasi survei secara offline meliputi 7 Provinsi tempat Bantuan Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja dilaksanakan. Pemilihan Provinsi berdasarkan pertimbangan keberadaan sampel yang dianggap representatif. Lokasi penelitian yang dilakukan survei lapangan dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6 : Pemilihan Lokasi dan Sampel Penelitian
 Sumber : Hasil Pengolahan

Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden terpilih dari kategori Pemilik lembaga pelatihan, instruktur pelatihan dan peserta pelatihan.

Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk dapat mengumpulkan, menyusun serta menganalisis hasil penelitian. “Suatu penyelesaian harap disertai interpretasi data secara cermat atau melukiskan diri seseorang, lembaga atau masyarakat tertentu pada saat sekarang, berdasarkan faktor-faktor yang nampak saja dalam situasi yang sedang diselidiki” (Moleong, 2006).

Langkah-langkah untuk melakukan analisis deskriptif adalah sebagai berikut

- Membuat tabel distribusi frekuensi dari sub variabel
- Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan
- Merumuskan skor tersebut kedalam rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase

f = jumlah subjek yang ada pada kategori tertentu

N = frekuensi total atau keseluruhan jumlah subjek

Setelah data tersebut dipersentasikan, tahap selanjutnya adalah mendiskripsikan persentase data tersebut menjadi kalimat kualitatif berdasarkan kategori skor penilaian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan kategorisasi persentase skor yang diperoleh pada masing-masing indikator sebagai berikut :

- Menentukan skor tertinggi Alternatif pilihan jawaban dari setiap item pertanyaan terdiri dari 5 jawaban :

$$\text{Skor tertinggi} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100$$

$$\text{Skor terendah} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{Jarak} = 100\% - 20\% = 80\%$$

$$\text{Interval Kriteria} = 80\% \div 5 = 16\%$$

- Mengelompokkan interval nilai dan melengkapinya dengan kategori kualitatif Berdasarkan hasil perolehan nilai skor terendah mendapatkan nilai 20% dan hasil skor tertinggi 100%, maka akan

diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik dan kurang baik. Hal ini dilakukan untuk menjadikan patokan ketika program telah dievaluasi

Tabel 1 : Kategorisasi Skor Penilaian

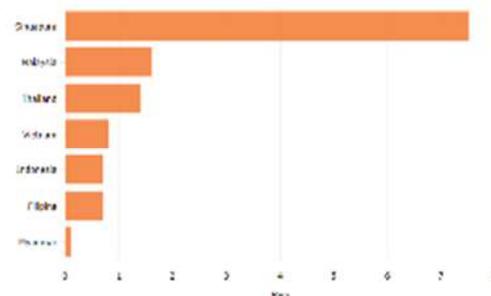
Interval	Kategorisasi
84% - 100%	Baik Sekali
68% - 83%	Baik
52% - 67%	Cukup/Sedang
36% - 51%	Kurang Baik
20% - 35%	Tidak Baik

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1992). Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif yang diterapkan melalui tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles, Mathew, & Michael, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kewirausahaan Di Indonesia

Berdasarkan laporan *US News and World Report* dalam *2019 Best Countries*, Indonesia dan Filipina menempati peringkat kedua terendah dalam dimensi kewirausahaan pada 2018, skor yang diperoleh Indonesia dan Filipina sebesar 0,7 dari skala 10, di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 80 negara yang disurvei (Dwi, 2019). Gambar 7 menunjukkan tingkat kewirausahaan negara-negara di Asean tahun 2018.



Gambar 7: Peringkat Kewirausahaan di Asia Tenggara 2018

Sumber : U.S. News & World Report, 2019

Rendahnya peringkat kewirausahaan Indonesia disebabkan rendahnya skor pada semua indikator, yaitu di bawah 2 dari skala 10. Ada beberapa indikator yang mendapatkan skor rendah, yakni kerangka hukum yang baik dan keahlian teknologi dengan skor masing-masing sebesar 0,3 dan 0,5. Sementara itu, skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah 1,8 untuk indikator terhubungnya Indonesia ke seluruh dunia (Dwi, 2019).

Fakta yang ditemukan pada tahun 2018, menunjukkan di negara maju rata-rata 14%

dari total jumlah penduduk usia kerja adalah berprofesi sebagai entrepreneur, sedangkan di Indonesia hanya mencapai 3,1%. (Zuraya, 2018). Berdasarkan laporan Global entrepreneurship Index, Indonesia menduduki peringkat 94 dan menunjukkan posisi yang jauh di bawah negara-negara Asean lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang masing-masing menduduki peringkat 27, 58, 71, dan 84 (Zuraya, 2018). Gambar 8 menunjukkan nilai indeks kewirausahaan Indonesia.



Gambar 8 : Nilai Index Kewirausahaan Indonesia
 Sumber : (Zuraya, 2018)

Berdasarkan data dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, hingga tahun 2019 pemuda Indonesia yang menjadi seorang pengusaha ternyata hanya 3,1 % dari total jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, presentase ini tidak bertumbuh jika dibandingkan negara tetangga, (Murdaningsih, 2020). Gambar 9 menunjukkan jumlah pengusaha muda di Indonesia berdasarkan Usia dan total omzet. Jumlah pengusaha di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya, jumlah pengusaha di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan pengusaha di Singapura 7 %, Malaysia 6 %, Thailand 5 % (“Jumlah Pengusaha di Indonesia Meningkat, Tapi...,” 2020).



Gambar 9 : Jumlah Pengusaha Muda Indonesia Berdasarkan Usia
 Sumber : (Yoshio, 2020)

Walaupun terjadi kenaikan persentase jumlah pengusaha muda di Indonesia dibandingkan tahun 2016 seperti terlihat pada gambar 10, tetapi peningkatan jumlah pengusaha muda di Indonesia tidak menaikkan peringkat dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Jika pemerintah Indonesia ingin meningkatkan jumlah pengusaha maka diperlukan bantuan dari seluruh pihak untuk berjuang dapat menandingi jumlah pengusaha negara tetangga dengan melahirkan pengusaha muda baru.



Gambar 10 : Peringkat Pengusaha Muda Indonesia di Antara Negara-Negara Asean
Sumber : (Pebrianto, 2016)

Salah satu faktor penyebab masih rendahnya jumlah pengusaha di Indonesia adalah kurangnya keterampilan individu. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh lembaga riset Smeru, hanya 05 per 100 individu berusia 15 tahun yang memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Sebagai perbandingan, negara-negara yang memiliki jumlah individu berketerampilan sangat tinggi lebih banyak, seperti Amerika Serikat 6,5 per 100 individu, Thailand 9,4 dan Korea Selatan 18,2. Tingginya jumlah perindividu yang memiliki keterampilan sangat tinggi berbanding lurus dengan tingginya jumlah penduduk yang berwirausaha (Andrea, 2019). Gambar 11 menunjukkan jumlah individu yang memiliki keterampilan sangat tinggi di Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya.



Gambar 11 : Dampak Fokus Pendidikan Terhadap Tingkat Keterampilan Individu yang Dimiliki Oleh Penduduk Indonesia
Sumber : (Andrea, 2019)

Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kewirausahaan adalah sistem pendidikan yang kurang mendorong menjadikan seseorang *entrepreneurship*. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa status wirausahawan merupakan sebuah profesi yang kurang menjanjikan, perlu waktu lama untuk bisa menjadi seorang yang sukses (Zuraya, 2018).

Rendahnya tingkat keterampilan penduduk Indonesia khususnya yang berusia muda disebabkan karena kurikulum pendidikan formal hanya fokus pada keterampilan teknis, seperti membaca, menghafal, dan berhitung, tetapi belum membiasakan individu berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah (Andrea, 2019). Keterampilan individu yang masih minim membuat Indonesia sulit mencetak pengusaha baru. Padahal, kewirausahaan penting untuk menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan pajak negara, mendorong inovasi masyarakat, dan menjadi indikator daya saing Indonesia di kancah global (Andrea, 2019).

Strategi Untuk Menciptakan Wirausaha Baru

Diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melaju dengan pesat jika jumlah wirausaha minimal mencapai 4 % dari total populasi, sedangkan sampai tahun 2019 baru mencapai 2 % dari total 240 juta penduduk Indonesia . Salah satu upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran yang masih tinggi di Indonesia adalah dengan

menciptakan lapangan kerja melalui penciptaan wirausaha baru (Hidayat, 2019).

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang disengaja dan datang dari pilihan seseorang serta bukan merupakan sesuatu yang tidak disengaja/kecelakaan, dalam hal ini lingkungan akan selalu menyediakan pilihan bagi seseorang untuk melakukan aktifitas kewirausahaan (Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000). Ketika seseorang memutuskan untuk berwirausaha, artinya orang tersebut telah bersedia untuk berperilaku sebagai wirausahawan sebagai jalan hidup yang dipilihnya. Niat seseorang untuk berwirausaha akan timbul sebagai akibat proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pembentukan suatu usaha (Katz.J & W, 1988).

Kesungguhan niat seseorang untuk melakukan perbuatan yang berdampak memunculkan suatu perilaku tertentu dikenal dengan istilah intensi (Wijaya, 2007). Dalam dunia kewirausahaan intensi dapat diartikan sebagai proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk pembentukan suatu usaha (Katz.J & W, 1988). Intensi wirausaha dapat diartikan sebagai keberanian diri untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup, memajukan dan menciptakan usaha baru dengan modal kekuatan yang ada pada diri sendiri (Yanto, 1996).

Intensi wirausaha merupakan suatu gejala psikis untuk dapat memusatkan perhatian serta berbuat sesuatu yang berkaitan dengan wirausaha, sehingga pelaku memiliki perasaan senang karena merasa bermamfaat bagi dirinya sendiri (Santoso, 1993). Intensi berwirausaha selalu dicirikan dengan keinginan seorang individu untuk melakukan tindakan wirausahaan dengan menciptakan produk baru melalui peluang bisnis dan disertai keberanian dalam mengambil risiko. Intensi berwirausaha dapat diukur dengan skala yang dikernal dengan istilah "enterpreneurial intention", adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran ini berupa pemilihan jalur usaha dari pada bekerja untuk orang lain, memilih karir sebagai wirausahawan, membuat perencanaan untuk memulai usaha, berkeinginan meningkatkan status sosial/harga diri sebagai wirausaha serta mendapatkan pendapatan yang lebih baik (Ramayah & Harun, 2005).

Keberhasilan wirausahawan dalam menjalankan usahanya ditentukan 49% oleh faktor sifat kepribadian seperti keinginan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, memotivasi diri dan berfikir positif, memiliki komitmen dan sabar dalam menjalankan usahanya (Lupiyoadi, 2016). Adapun persen faktor lainnya yang menentukan keberhasilan wirausahawan adalah kemampuan memahami lingkungan bisnis seperti belajar dari keberhasilan pesaing, rasa ketertarikan dengan industri, memiliki pengetahuan tentang satu bidang usaha, adanya kemauan untuk belajar, memiliki pengalaman dalam satu usaha industri, memiliki pengetahuan tentang produk dan jasa, serta pemahaman tentang persaingan (Lupiyoadi, 2016).

Kewirausahaan saat ini tidak lagi dipandang sebagai bakat yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak bisa dipelajari. Kewirausahaan sekarang dipandang sebagai suatu kemampuan yang bisa didapatkan seseorang melalui pengalaman dilapangan, sehingga dapat dikategorikan sebagai disiplin ilmu yang dapat diajarkan atau ditularkan kepada orang lain melalui suatu program pendidikan, pelatihan dan pemagangan (Deni, 2018). Ilmu kewirausahaan dapat diajarkan oleh seseorang yang memiliki pendidikan non formal kepada orang yang mengenal potensi diri dan bakatnya (Suryana, 2013).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan niat seseorang untuk berwirausaha adalah melalui pelatihan kecakapan hidup. Program pelatihan kecakapan hidup akan memberikan peluang bagi peserta pelatihan untuk memperoleh informasi dan gambaran berkaitan dengan membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik salah satunya melalui kegiatan usaha, mereka juga akan mendapat gambaran peluang usaha yang dapat dilakukan serta bagaimana memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dirintis.

Program Pelatihan Kecakapan Hidup Sebagai Upaya untuk Menciptakan Wirausaha Muda

Indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* secara konseptual dikelompokkan : (1) Kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*) (2)

Kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*akademik skills*) (3) Kecakapan sosial (*social skills*) (4) Kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifik skills*) atau keterampilan teknis (*technical skills*) (“Pendidikan Live Skills,” 2013).

Kecakapan hidup yang ditandai dengan tingkat kreatifitas dan keterampilan yang dimiliki seseorang, akan menjadi modal untuk menjadi wirausahawan. Seorang wirausahawan tidak hanya membutuhkan modal uang tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, unik dan berbeda dari usaha-usaha yang telah berkembang sebelumnya, sehingga mampu bersaing dan memiliki pasar yang potensial. Dengan demikian pengertian kecakapan hidup tidak terbatas hanya pada kreatifitas tetapi juga melingkupi kemampuan melihat peluang, keberanian dalam mengambil resiko, kemampuan untuk berinovasi serta mengembangkan ide usaha yang sudah ada (Deni, 2018).

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya definisi dan fungsi dari Pendidikan Nonformal sebagaimana yang tercantum di dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yaitu: “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional” (Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Adapun satuan PLS atau Pendidikan Nonformal terdiri atas; lembaga kursus atau pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM), Majelis Taklim, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta satuan pendidikan yang sejenis berupaya menjembatani pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam tersebut. Pendidikan Luar Sekolah (PLS) memiliki peran yang sangat penting dengan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga menimbulkan kebutuhan yang semakin beragam dalam menghadapi peralihan informasi, pengetahuan serta keterampilan (Megawati, 2016). Untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik diperlukan keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan fungsional. Adapun tujuan utama dari program PLS berorientasi pada pendidikan dalam waktu yang singkat, isi program berpusat pada lulusan dan kepentingan perorangan, lebih menekankan pada pelatihan dan praktek, persyaratan masuk ditentukan bersama peserta didik serta penyajian pendidikan dilakukan dalam lingkungan peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengawasan diatur sendiri secara fleksibel dan demokratis (Sudjana, 2004).

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai salah satu satuan program dari pendidikan nonformal memiliki peran yang urgen dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Program pendidikan kecakapan hidup secara khusus bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga :

- 1) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Memuliakan Memartabatkan Kehidupan Manusia, Jakarta, 2007)
- 2) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global (Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Memuliakan Memartabatkan Kehidupan Manusia, Jakarta, 2007)
- 3) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya (Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Memuliakan Memartabatkan Kehidupan Manusia, Jakarta, 2007)
- 4) Memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat (Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Memuliakan Memartabatkan Kehidupan Manusia, Jakarta, 2007)

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup memberi peluang bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat bermanfaat ketika bekerja baik disertor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja yang ada serta mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri. *Life skills* merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja (Anwar, 2006).

Setelah mengikuti pelatihan kecakapan hidup, masyarakat bisa belajar untuk memiliki sikap dan perilaku bagaimana mengembangkan dan meningkatkan usahanya, selain itu mereka juga dapat meningkatkan percaya diri dan berani mengambil resiko dalam membuka usaha (Iip, 2016). Melalui pelatihan kecakapan hidup akan ditumbuhkan kemampuan manajerial yang dapat diterapkan ketika peserta pelatihan akan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah dirintis. Perubahan perilaku masyarakat yang belajar melalui pelatihan kecakapan hidup dapat ditunjukkan dari perubahan tingkat kecakapan tangan, kecakapan hati, kecakapan otak dan kecakapan kesehatan (Suryono, 2014).

Bantuan Program Pelatihan Kecakapan Hidup dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada LPKS

Selama tahun 2015 – 2017 Presiden Joko Widodo memberi instruksi untuk memfokuskan pembangunan di sektor infrastruktur, selanjutnya pada tahun 2019 Indonesia harus fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui proses pendidikan dan pelatihan kejuruan. Dalam pengembangan SDM tidak hanya dapat mengandalkan peran pemerintah saja tetapi memerlukan kerjasama dari masyarakat dan dunia usaha untuk dapat menyiapkan pasokan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang memadai sehingga mampu meningkatkan daya saing

nasional (*Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2019*, 2019).

Dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan terus memacu peran LPKS dengan memberikan stimulan berupa bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja. Lembaga-lembaga tersebut didorong sebagai pelaksana pelatihan berbasis kompetensi agar masyarakat di sekitarnya memiliki aksesibilitas untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Inilah yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan dalam menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia Indonesia secara masif.

Program pelatihan di LPKS merupakan program layanan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak menitikberatkan pada Pendidikan Kecakapan Hidup yang dikemas dalam bentuk program pelatihan. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, para peserta dipastikan memiliki kompetensi di bidang tertentu (sesuai dengan kejuruan/program yang dikuti), sehingga mampu mengisi peluang kerja yang dibutuhkan di dunia kerja maupun mendorong untuk dapat mengembangkan usaha secara mandiri.

Kementerian Ketenagakerjaan memberi stimulus berupa pemberian bantuan program pelatihan Kecakapan Hidup kepada LPKS tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong LPKS untuk turut berpartisipasi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kecakapan hidup; sehingga lulusan pelatihan didorong untuk dapat mengembangkan usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Memperluas akses dan mutu pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat untuk dapat mengikuti pelatihan.
3. Memberikan bekal kompetensi bagi angkatan kerja sehingga mampu mengisi peluang dalam penciptaan dan pengembangan usaha.
4. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Manfaat dari Pemberian Bantuan Program Pelatihan Kecakapan Hidup utamanya untuk

memberikan kesadaran akan pentingnya keterampilan yang didapat dari pelatihan sebagai salah satu jalan untuk membuka usaha bagi orang-orang yang tidak mendapat pelatihan kerja dari sektor pendidikan formal. Selain daripada itu, bantuan program dapat menjangkau daerah-daerah yang masih minim akses pelatihan. Pemberian bantuan program pelatihan kecakapan hidup ini dapat berguna bagi masyarakat yang berkeinginan untuk berwiraswasta. Pada akhirnya, dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran.

Evaluasi Terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kecakapan Hidup

Untuk mengetahui mutu dari lembaga pelatihan dilakukan pengisian kuesioner kepada responden dari kelompok peserta, instruktur, pemilik lembaga pelatihan maupun BLK pembina. Kuesioner pertanyaan utama yang diajukan untuk mengetahui mutu lembaga pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Skor
1	Kualitas/kredibilitas lembaga penyelenggara pelatihan	86,28
2	Upaya lembaga penyelenggara dalam memfasilitasi peserta pelatihan untuk masuk ke dunia kerja atau dunia usaha	87,60
	Rata-Rata	86,94

Sumber: Hasil Pengolahan

Kualitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pelatihan yang menerima bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja masuk dalam kategori **Baik Sekali** demikian pula lembaga penyelenggara pelatihan dinilai cukup memberikan peluang bagi lulusnya untuk masuk ke Dunia Usaha dan Dunia Instruksi (DUDI).

Penilaian yang sangat baik untuk lembaga penyelenggara pelatihan dibuktikan dengan tingginya proporsi lembaga pelatihan yang telah memiliki badan hukum, terakreditasi dan melakukan pelatihan secara kontinu baik dengan dana berasal dari bantuan pemerintah maupun dana yang dimiliki oleh lembaga dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12 : Persentase lembaga pelatihan yang telah memiliki badan hukum, terakreditasi dan melakukan pelatihan secara kontinu

Sumber : Hasil Pengolahan

Evaluasi Terhadap Peserta Pelatihan Kecakapan Hidup

Untuk mengetahui karakteristik peserta pelatihan dilakukan pengisian kuisisioner kepada responden dari kelompok peserta, instruktur, maupun pemilik lembaga pelatihan. Kuisisioner pertanyaan utama yang diajukan untuk mengetahui mutu lembaga pelatihan adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Skor
1	Merasa betsemangat dalam mengikuti pelatihan	92,04
2	Membaca/mempersiapkan bahan materi sebelum mengikuti pelatihan	84,97
3	Mengulang mempelajari/membaca catatan pelatihan	83,22
4	Merasa dengan mengikuti pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dalam upaya memasuki lapangan pekerjaan dan dunia usaha	88,79
5	Kemampuan/kompetensi awal rata-rata peserta pelatihan	58,06
6	Motivasi peserta selama mengikuti materi pelatihan	68,80
7	Semangat peserta dalam menerima materi pelatihan	70,00
8	Wawasan peserta terhadap masalah masalah aktual di masyarakat terkait dengan materi yang disampaikan	61,14
	Rata-Rata	75,88

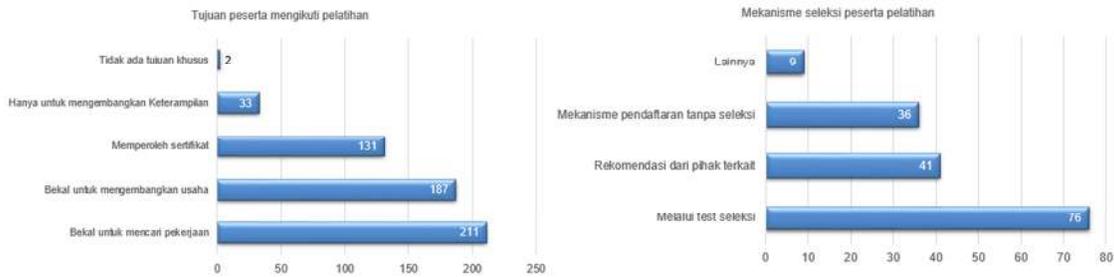
Sumber : Hasil Pengolahan

Hasil evaluasi input dari sisi peserta menunjukkan nilai rata-rata yang tergolong pada kategori **Baik**. Dari komponen-komponen pertanyaan yang diajukan, nilai terendah diperoleh dari sisi kemampuan/kompetensi awal rata-rata peserta

pelatihan yang tergolong pada kategori **Cukup/Sedang**. Hal ini bisa dipahami karena pada umumnya peserta pelatihan berasal dari masyarakat yang tidak mampu dan baru pertama kali mengikuti pelatihan.

Sebagian besar peserta pelatihan memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan karena mereka pada umumnya berasal dari masyarakat yang tidak mampu dan berkeinginan untuk meningkatkan keterampilannya sebagai bekal untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Karena keterbatasan kuota pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah, lembaga penyelenggara pada umumnya harus melakukan seleksi terhadap calon peserta pelatihan. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan peserta pelatihan yang benar-benar sesuai dengan persyaratan yaitu masyarakat yang tidak mampu dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelatihan dalam upaya dapat memasuki DUDI. Gambar 13 menunjukkan motivasi peserta pelatihan dan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh lembaga.



Gambar 13 : Motivasi Peserta Pelatihan Dan Mekanisme Seleksi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan
 Sumber : Hasil Pengolahan

Evaluasi Terhadap Kompetensi Instruktur Pelatihan Kecakapan Hidup

Untuk mengetahui kompetensi instruktur yang digunakan oleh lembaga pelatihan dilakukan pengisian kuisioner kepada responden dari kelompok peserta dan pemilik lembaga. Dalam kuisioner pertanyaan utama yang diajukan untuk mengetahui kompetensi instruktur pelatihan adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Skor
1	Instruktur menguasai materi pelatihan teori	90,44
2	Instruktur menguasai Materi pelatihan praktik	91,85
3	Instruktur dapat menjawab pertanyaan peserta Pelatihan dengan baik	89,32
4	Instruktur memiliki wawasan yang luas terhadap masalah-masalah aktual terkait dengan materi yang disampaikan	89,15
Rata-Rata		90,19

Kompetensi instruktur dinilai **Baik Sekali** oleh peserta. Lembaga penyelenggara memiliki keterbatasan untuk dapat merekrut instruktur tetap karena tidak mampu memberikan gaji bulanan mengingat jumlah peserta pelatihan yang tidak menentu setiap bulannya. Latar belakang pendidikan/ kompetensi instruktur dinilai oleh peserta maupun oleh lembaga penyelenggara pelatihan sudah sesuai dengan bidang pelatihan/kejuruan diselenggarakan. Instruktur pelatihan pada umumnya telah memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai baik difasilitasi oleh lembaga maupun atas biaya sendiri seperti terlihat pada gambar 14.



Gambar 14 : Kompetensi Instruktur Pelatihan
 Sumber : Hasil Pengolahan

Dampak Pendidikan Kecakapan Hidup yang Dilaksanakan Oleh LPKS terhadap Pengembangan Kewirausahaan

Untuk mengetahui keluaran Pendidikan Kecakapan Hidup dilakukan pengisian kuisisioner maupun wawancara mendalam kepada responden dari kelompok Pemilik Lembaga/penyelenggara Pelatihan, peserta pelatihan dan instruktur pelatihan. Hasil kuisisioner yang berisi pertanyaan untuk mengetahui kesesuaian Pendidikan Kecakapan Hidup dengan kebutuhan peserta dalam rangka mencari pekerjaan atau pengembangannya usaha adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Skor
1	Materi pelatihan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	89,66
2	Kesesuaian bantuan dana pelatihan/bantuan program dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia usaha	80,75
Rata-Rata		85,205

Materi pelatihan yang diberikan dinilai **Sangat Baik** oleh peserta pelatihan dan sesuai dengan kebutuhan DUDI. Hal ini diperkuat dengan banyaknya alumni pelatihan yang sudah bekerja maupun yang sudah menjadi pelaku usaha mandiri seperti terlihat pada

gambar

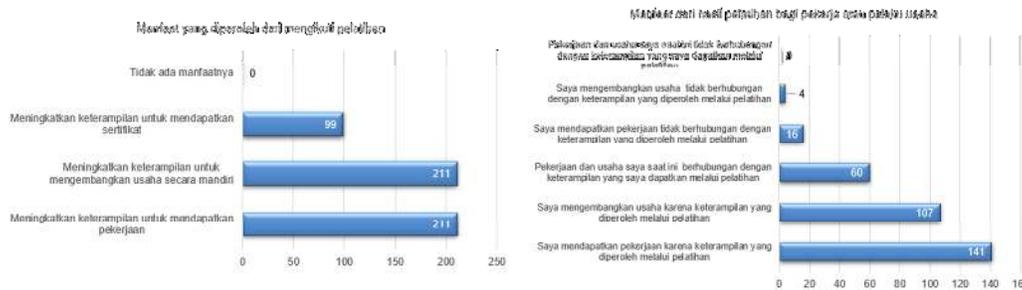
15.



Gambar 15 : Dampak Pemberian Bantuan Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja

Sumber : Hasil Pengolahan

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja adalah memberi peluang bagi mereka untuk dapat memasuki dunia kerja dan dunia usaha dengan bekal keterampilan yang dimilikinya setelah mengikuti pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden peserta pelatihan seperti terlihat pada gambar 16.



Gambar 16 : Manfaat Pemberian Bantuan Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, berbagai program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh LPKS dengan menggunakan dana bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dampak yang signifikan terhadap penciptaan dan pengembangan wirausaha baru khususnya dikalangan angkatan kerja muda, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Kecakapan Hidup Bidang Tata Rias Rambut dan Rias Pengantin

- 1 Alumni program pendidikan kecakapan hidup di bidang tata kecantikan rambut dan tata rias pengantin, banyak yang sudah buka usaha salon bahkan mendirikan LPKS.
- 2 Bagi yang belum mampu membuka usaha sendiri instruktur dan pemilik lembaga pelatihan berusaha memanfaatkan jaringan yang mereka miliki untuk dapat

- menyalurkan lulusan bekerja di salon-salon, sehingga selain memperoleh penghasilan mereka dapat mencari pengalaman sebagai persiapan untuk dapat membuka usaha secara mandiri.
- 3 Mayoritas lulusan membuka salon rumahan setelah selesai pelatihan. Peluang tata rias khususnya rias wajah banyak dicari orang. Terkadang LPK mempekerjakan lulusan ketika memperoleh orderan yang banyak.
 - 4 Setelah mengikuti pelatihan dengan modal pengetahuan yang diperoleh, alumni telah bisa menerima order kecil-kecilan, ada yang membuka usaha di rumah dengan peralatan seadanya dan bermodalkan make up karena merupakan kebutuhan dasar sementara peralatan lain terkadang meminjam dari lembaga pelatihan. Ada juga yang bersedia menjadi tukang salon keliling sesuai permintaan konsumen.
 - 5 Lulusan yang sudah mengembangkan usaha sendiri pada umumnya menggunakan cara marketingnya lewat media sosial misalnya facebook, atau media sosial lainnya. Sistem yang mereka gunakan adalah jemput bola, karena persaingan usaha sangat berat di era digital saat ini.

b. Pendidikan Kecakapan Hidup Bidang Menjahit

- 1 Alumni pelatihan menjahit setelah ikut pelatihan seringkali diajak oleh pihak lembaga pelatihan untuk bekerja di tempat usahanya, sambil memperkaya keterampilannya sebelum siap untuk membuka usaha sendiri.
- 2 LPKS selain berfungsi sebagai lembaga pelatihan pada umumnya juga memiliki usaha konveksi, sehingga dapat merekrut alumni pelatihan yang telah diseleksi berdasarkan hasil jahitan yang paling rapih.
- 3 Lembaga pelatihan menjahit yang memiliki perusahaan konveksi dapat bekerjasama dengan lulusan dalam menjalankan perusahaan konveksinya.
- 4 Alumni juga yang membentuk kelompok usaha, mereka ada yang membentuk usaha maklun, membuat baju dan aksesoris polisi, tas dll. Selain itu ada juga yang mengembangkan industri rumahan seperti pembuatan baju-baju anak-anak.
- 5 Lulusan pelatihan menjahit pada awalnya mereka takut untuk menerima orderan,

mereka mulai membuat baju untuk keluarga sendiri baru untuk orang lain.

- 6 Untuk dapat memiliki mesin jahit sendiri sebagai modal usaha, lembaga memfasilitasi dengan menawarkan pembelian mesin jahit yang *second* atau yang baru.
- 7 Banyak lulusan dari program pelatihan menjahit yang telah memiliki usaha sendiri bahkan kewalahan dalam memenuhi orderan menjahit karena belum ada pabrik garmen atau industri. LPKS yang kredibel memberikan keuntungan bagi lulusannya untuk memperoleh kepercayaan dari pelanggannya ketika mereka berhasil membuka usaha sendiri.
- 8 Bagi lulusan yang belum siap untuk membuka usaha sendiri, lembaga pelatihan kejuruan menjahit dapat memfasilitasi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan karena dilingkungan sekitarnya pada umumnya banyak terdapat perusahaan konveksi sehingga lulusan pelatihan langsung dapat disalurkan untuk bekerja di konveksi. Perusahaan konveksi memberi fasilitas bantuan mesin pada masyarakat sehingga bisa mengerjakan di rumah.

c. Pendidikan Kecakapan Hidup Bidang Komputer

- 1 Lembaga pelatihan komputer bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memfasilitasi lulusannya dalam pemagangan di sekolah ada juga yang buka pengetikan sendiri.
- 2 Lulusan pelatihan komputer banyak disalurkan ke sekolah-sekolah untuk mengurus Dapodik, banyak digunakan oleh perusahaan notaris. Lembaga pelatihan telah memiliki kerjasama sehingga memudahkan untuk penyaluran lulusannya.
- 3 Sebagian siswa lulusan pelatihan komputer ada yang dipekerjakan sebagai staff administrasi oleh LPKS.
- 4 Lembaga pelatihan membantu untuk menyalurkan lulusannya diantaranya dengan proses pemagangan di perusahaan yang sudah memiliki kerjasama.
- 5 Ada juga yang disalurkan untuk bekerja di desa, karena waktu sosialisasi program bantuan pelatihan lembaga bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa.

Sekretaris desa merekomendasikan masyarakatnya yang dapat mengikuti pelatihan. Setelah lulus dikembalikan ke desa untuk bekerja sebagai admin, di desa sudah menggunakan program komputer untuk menangani masalah administrasi.

d. Pendidikan Kecakapan Hidup Bidang Otomotif

1. Untuk lulusan pelatihan otomotif relatif sulit untuk bisa mengembangkan usaha karena persaingan yang ketat dengan bengkel-bengkel yang memiliki peralatan dengan teknologi yang tinggi.
2. Lulusan otomotif masih banyak yang menganggur, mencoba buka bengkel hanya bisa bertahan sebentar karena pengusaha import lebih banyak.
3. Lulusan pelatihan otomotif bisa disalurkan oleh LPKS untuk bekerja dibengkel-bengkel resmi bagi LPKS sudah memiliki kerjasama dengan perusahaan.

e. Pendidikan Kecakapan Hidup Bidang Spa dan Massage

1. Alumni di bidang pelatihan spa dan *massage* sebagian besar sudah dapat menerima orderan secara mandiri. Bahkan ada yang setelah 4 tahun sudah bisa membuka 4 cabang salon.
2. Lulusan pelatihan spa dan *massage* biasanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja spa di hotel-hotel. Peserta yang sudah lulus dari LPK tidak ada yang ditolak oleh hotel, karena memang hotel-hotel sudah mengetahui kualitas LPK nya.

KESIMPULAN

Dampak dari pelaksanaan bantuan program pelatihan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh LPKS, dapat membuka peluang untuk berwirausaha, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, khususnya bagi masyarakat yang putus sekolah.

Lembaga penyelenggaran memberikan motivasi terhadap para lulusan untuk secara bertahap dapat mendirikan usaha sendiri. Pada saat pelatihan peserta pelatihan dibimbing dan diarahkan untuk bisa mendirikan usaha mandiri, mereka terus memantau para lulusan dan mengajak kerjasama dalam menjalankan

usaha, karena pada umumnya LPKS selain sebagai lembaga pelatihan mereka juga pada umumnya memiliki bisnis yang sesuai dengan jenis pelatihan yang diselenggarakan.

Walaupun masih memiliki keterbatasan, LPKS penerima bantuan yang memiliki kredibilitas yang bagus dan terakreditasi pada umumnya sudah memiliki jaringan dengan DUDI, sehingga lebih dari 70% lulusannya dapat disalurkan untuk bekerja di perusahaan maupun dibimbing untuk dapat mengembangkan usaha secara mandiri

LPKS penerima bantuan yang memiliki komitmen tinggi untuk memberikan peluang pada lulusannya agar dapat memasuki DUDI, memiliki berbagai strategi agar dapat memberikan bekal keterampilan pada lulusannya. Setelah pelatihan selesai, alumni masih terus bisa berkomunikasi dengan pihak lembaga dan instruktur untuk mendapatkan bimbingan dan kerjasama dalam upaya memasuki DUDI.

Ketika bantuan disalurkan pada LPKS penyelenggara pelatihan kecakapan hidup yang berkualitas, manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akan terlihat dengan jelas. Dengan adanya bantuan program pelatihan kecakapan hidup, memberi kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu untuk dapat meningkatkan kompetensinya sehingga berhasil mengembangkan usaha.

LPKS penyelenggara pelatihan kecakapan hidup tidak hanya memberikan pelatihan selama program berlangsung, tetapi tetap membina lulusan untuk dapat mengembangkan usaha. Di daerah industri pada umumnya LPKS sudah punya kerjasama dengan industri sehingga dengan mudah menyalurkan lulusannya. Untuk LPKS yang tidak berada di daerah industri pada umumnya membina lulusannya untuk mengembangkan usaha bermodalkan keterampilan yang telah dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, L. (2019). Minim Keterampilan, Indonesia Sulit Cetak Pengusaha. Retrieved November 23, 2020, from Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6b4b710/minim-keterampilan-indonesia-sulit-cetak-pengusaha>

- Anwar. (2006). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*. Bandung: Alfabeta.
- Arzyan, M. N. (2020). Potret Pasar Tenaga Kerja untuk Memahami Relevansi RUU Cipta Kerja. Retrieved November 23, 2020, from macroeconomicdashboard. website: <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/>
- Asyari, T. (2019). Pemerintah Terus Tekan Tingkat Pengangguran. Retrieved November 23, 2020, from PKPBerdikari.id website: <https://www.pkpberdikari.id/infografis/pemerintah-terus-tekan-tingkat-pengangguran/>
- Bogdan, R., & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Deni, F. M. (2018). Pengaruh Pemagangan Dan Pelatihan Kecakapan Hidup Terhadap Penumbuhan Wirausaha Baru. *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2), 12–23.
- Dwi, H. J. (2019). Peringkat Kewirausahaan Indonesia Nomor Dua Terendah di ASEAN. Retrieved November 23, 2020, from databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/04/peringkat-kewirausahaan-indonesia-nomor-dua-terendah-di-asean>
- Hidayat, A. A. N. (2019). Jumlah Pengusaha di Indonesia Baru 2 Persen dari Total Penduduk. Retrieved November 23, 2020, from Tempo.Co website: <https://bisnis.tempo.co/read/1254508/jumlah-pengusaha-di-indonesia-baru-2-persen-dari-total-penduduk/full&view=ok>
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, 4(1), 14.
- Iip, S. Y. S. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Mandiri Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 176–186.
- Jumlah Pengusaha di Indonesia Meningkat, Tapi.... (2020). Retrieved November 23, 2020, from Koinworks website: <https://koinworks.com/blog/jumlah-pengusaha-di-indonesia-meningkat/>
- Katz, J., & W, G. (1988). Properties of Emerging Organizations. *Journal of Academy of Management Review*, 13(2), 429–441.
- Krueger, N. ., Reilly, M. ., & Carsrud, A. . (2000). Competing Models of Entrepreneurial Intentions. *Journal of Business Venturing*, 411–432.
- Kurniawan, F. (2018). Situasi Genting Angkatan Kerja Indonesia. Retrieved November 23, 2020, from Tirto.id website: <https://tirto.id/situasi-genting-angkatan-kerja-indonesia-cFal>
- Lupiyoadi. (2016). *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Megawati, I. (2016). Efektivitas Pelatihan Kecakapan Hidup Modifikasi Kerudung Dalam Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 1(1), 118–140.
- Miles, B., Mathew, & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP: UIP.
- Moleong, L. . (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murdaningsih, D. (2020). Wirausaha di Indonesia Baru 3 Persen dari Jumlah Penduduk. Retrieved November 23, 2020, from Repbulika.Co.Id website: <https://republika.co.id/berita/qb5fb8368/wirausaha-di-indonesia-baru-3-persen-dari-jumlah-penduduk>
- Pebrianto, H. R. (2016). Memulai Usaha Di Usia Muda Dengan Ralali. Retrieved November 23, 2020, from Handikoo.com website: <https://www.handikoo.com/2016/10/memulai-usaha-di-usia-muda-dengan->

- ralali.html
- Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Memulihkan Memartabatkan Kehidupan Manusia, Jakarta.* (2007). Jakarta: Dirjen PLS.
- Pendidikan Live Skills. (2013).
- Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lpks) Tahun 2019.* (2019). Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Danproduktivitas.
- Rahadian, A. (2019). Mengintip Potret Suram Tenaga Kerja di Indonesia. Retrieved November 23, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008210058-16-105438/mengintip-potret-suram-tenaga-kerja-di-indonesia>
- Ramayah, T., & Harun, Z. (2005). Entrepreneurial Intention Among the Student of Universiti Sains Malaysia (USM). *International Journal of Management and Entrepreneurship*, 1(3), 8–10.
- Santoso. (1993). *Lingkungan Tempat Tinggal Menentukan Minat Berwirausaha.* Surakarta.
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Non Formal.* Bandung: Falah Production.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang.* Jakarta: Salemba Empat.
- Suryono, Y. (2014). Evaluasi Program Kecakapan Hidup Bagi Warga Binaan Trisanti. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 113–123.
- Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* , Pub. L. No. 23 (2003).
- Wijaya, T. (2007). Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(2), 117–127. Retrieved from <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/viewFile/16784/16764>
- Yanto. (1996). *Peluang Kerja dan Minat Berwirausaha di Kalangan Siswa Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pembangunan Pekalongan.* Semarang. Semarang: IKIP.
- Yoshio, A. (2020). Jejaring Wirausaha Muda Jadi Penyelamat Selama Pandemi. Retrieved November 23, 2020, from Katadata.co.id website: <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5f4e16b428b85/jejaring-wirausaha-muda-jadi-penyelamat-selama-pandemi>
- Yovanda, Y. R. (2020). BPS: Lulusan SMK Masih Dominasi Angka Pengangguran. Retrieved November 23, 2020, from Tribun Bisnis website: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/05/bps-lulusan-smk-masih-dominasi-angka-pengangguran>
- Zuraya, N. (2018). Enggartiasto: Tingkat Kewirausahaan di Indonesia Rendah. Retrieved November 23, 2020, from RePublika.Co.Id website: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/18/pgsax3383-enggartiasto-tingkat-kewirausahaan-di-indonesia-rendah>